BAB II

RUANG LINGKUP PERUSAHAAN

UNIKOM

2.1 Sejarah Perusahaan

2.1.1 Profil Perusahaan

Kelistrikan di Indonesia dimulai pada akhir abad ke-19, pada saat beberapa perusahaan Belanda, antara lain pabrik gula dan pabrik teh mendirikan pembangkit tenaga listrik untuk keperluan sendiri.

Kelistrikan untuk kemanfaatan umum mulai ada pada saat perusahaan swasta Belanda yaitu NV NIGN yang semula bergerak dibidang gas memperluas usahanya di bidang listrik untuk kemanfaatan umum.

Pada tahun 1927 Pemerintah Belanda membentuk s' Lands Waterkracht Bedrijven (LB) yaitu perusahaan listrik negara yang mengelola PLTA Plengan, PLTA Lamajan, PLTA Bengkok Dago, PLTA Ubrug dan Kracak di Jawa Barat, PLTA Giringan di Madiun, PLTA Tes di Bengkulu, PLTA Tonsea Lama di Sulawesi Utara dan PLTU di Jakarta. Selain itu di beberapa Kotapraja dibentuk perusahaan-perusahaan listrik Kotapraja.

Dengan menyerahnya pemerintah Belanda kepada Jepang dalam perang Dunia II maka Indonesia dikuasai Jepang; oleh karena itu perusahaan listrik dan gas yang ada diambil alih oleh Jepang dan semua personil dalam perusahaan listrik tersebut diambil alih oleh orang-orang Jepang. Dengan jatuhnya Jepang ke tangan Sekutu dan diproklamasikannya kemerdekaaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, maka kesempatan yang baik ini dimanfaatkan oleh pemuda serta

buruh listrik dan gas untuk mengambil alih perusahaan-perusahaan listrik dan gas yang dikuasai Jepang. Setelah berhasil merebut perusahaan listrik dan gas dari tangan kekuasaan Jepang, kemudian pada bulan September 1945, Delegasi dari Buruh / Pegawai Listrik dan Gas yang diketuai oleh Kobarsjih menghadap Pimpinan KNI Pusat yang waktu diketuai oleh Mr. Kasman Singodimejo untuk melaporkan hasil perjuangan mereka. Selanjutnya delegasi Kobarsjih bersama-sama dengan Pimpinan KNPI Pusat menghadap Presiden Soekarno, untuk menyerahkan perusahaan-perusahaan listrik dan gas kepada Pemerintah Republik Indonesia. Penyerahan tersebut diterima oleh Presiden Soekarno dan kemudian dengan Penetapan Pemerintah tahun 1945 No. 1 tertanggal 27 Oktober 1945 maka dibentuklah Jawatan Listrik dan Gas dibawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga.

Dengan adanya Agesi Belanda I dan II sebagian besar perusahaan-perusahaan listrik dikuasai kembali oleh Pemerintah Belanda atau pemiliknya semula. Pegawai-pegawai yang tidak mau bekerjasama kemudian mengungsi dan menggabungkan diri pada kantor-kantor Jawatan Listrik dan Gas di daerah-daerah Republik Indonesia yang bukan daerah pendudukan Belanda untuk meneruskan perjuangan. Para pemuda kemudian mengajukan mosi yang dikenal dengan Mosi Kobarsjih tentang Nasionalisasi Perusahaan Listrik dan Gas Swasta kepada Pemerintah. Selanjutnya kristalisasi dari semangat dan jiwa mosi tersebut tertuang dalam Ketetapan Parleman RI No 163 tanggal 3 Oktober 1953 tentang Nasionalisasi Perusahaan Listrik milik bangsa asing di Indonesia, jika waktu konsesinya habis.

Sejalan dengan meningkatnya perjuangan bangsa Indonesia untuk membebaskan Irian Jaya dari cengkeraman penjajah Belanda maka dikeluarkan Undang Undang Nomor 86 tahun 1958 tertanggal 27 Desember 1958 tentang Nasionalisasi semua perusahaan Belanda dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1958 tentang nasionalisasi listrik dan gas milik Belanda.

Dengan Undang-undang tersebut, maka seluruh perusahaan listrik Belanda berada ditangan bangsa Indonesia.

Sejarah ketenagalistrikan di Indonesia mengalami pasang surut sejalan dengan pasang surutnya perjuangan bangsa. Tanggal 27 Oktober 1945 kemudian dikenal sebagai Hari Listrik dan Gas, hari tersebut telah diperingati untuk pertama kali pada tanggal 27 Oktober 1946 bertempat di Gedung Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) Yogyakarta. Penetapan secara resmi tanggal 27 Oktober 1945 sebagai Hari Listrik dan Gas berdasarkan keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga, Nomor 20 tahun 1960. Namun kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik, nomor 235/KPTS/1975 tanggal 30 September 1975 peringatan Hari Listrik dan Gas yang digabung dengan Hari Kebaktian Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik yang jatuh pada tanggal 3 Desember. Mengingat pentingnya semangat dan nilai-nilai hari listrik, maka berdasarkan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi, Nomor 1134.K/43/MPE/1992 tanggal 31 Agustus 1992 ditetapkan tanggal 27 Oktober sebagai Hari Listrik Nasional.

Sumber : Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi No: 2769/04/600.1/2002.

2.1.2 Sekilas Tahun Bersejarah PT. PLN (Persero)

Mari bayangkan sejenak hidup kita yang modern dan nyaman ini tanpa listrik. Sangat jauh berbeda bukan? Bagaimana cerita hadirnya listrik di negara kita? Berikut tahun-tahun penting dalam sejarah kelistrikan Indonesia :

1. 1945 NV NIGM direbut pemuda Indonesia.
2. 1945 (27 Oktober) Jawatan Listrik dan Gas dibentuk oleh Presiden Soekarno.
3. 1961 (1 Januari) BPU Perusahaan Listrik Negara dibentuk.
4. 1964 (28 Desember) Dibentuk 2 perusahaan negara yaitu : Perusahaan Listrik Negara (PLN)dan Perusahaan Gas Negara (PGN) 1972 PLN ditetapkan menjadi Perusahaan Umum.
5. 1992 Pihak swasta mulai ikut dalam bisnis penyediaan listrik di Indonesia.
6. 1994 (Juni) PLN ditetapkan menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

2.1.3 Sejarah Singkat PT. PLN (Persero)

Sejak masa penjajahan Belanda sampai awal tahun 1942, di Indonesia dikenal suatu badan atau perusahaan yang menyediakan pasokan tenaga listrik milik pemerintah, daerah otonom (Gemente) atau gabungan keduanya. Di Jawa Barat, khususnya Bandung, perusahaan pengelola serta penyedia tenaga listrik bagi kepentingan umum itu adalah *Bandoengsche Electriciteit Maatschappij* (BEM) yang berdiri tahun 1905. Pada tanggal 1 Januari 1920, Perusahaan Perseroan *Gemeenschpplijk Electriciteit Bedrif Voor Bandoeng* (GEBEO) menggantikan BEM. Penggantian ini dikukuhkan dengan akte pendirian Notaris Mr. Andriaan Hendrik Van Ophusien - Nomor 213 tanggal 31 Desember 1919.

Pada masa pendudukan Jepang antara 1942 - 1945, pendistribusian tenaga listrik dilaksanakan oleh Djawa Denki Djigyo Sha Bandoeng Shi Sha, dengan wilayah kerja diseluruh pulau Jawa.

Setelah proklamasi kemerdekaan RI, Indonesia mengalami periode perjuangan fisik sampai tibanya saat penyerahan kedaulatan RI dari pemerintah Hindia Belanda. Tahun 1959 merupakan awal penguasaan pengelolaan perlistrikan di seluruh Indonesia oleh Pemerintah Republik Indonesia, dengan dimulainya nasionalisasi perusahaan asing di Indonesia.

Maka pada 27 Desember 1957, GEBEO diambil alih oleh Pemerintah RI dengan dikukuhkannya peraturan pemerintah nomor 86 tahun 1958 j.o peraturan pemerintah nomor 18 tahun 1959 tentang Penentuan Perusahaan Listrik dan Gas Milik Belanda. Tahun 1961, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 67 dibentuk Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara (BPU - PLN) sebagai wadah kesatuan pimpinan PLN. PLN Bandung pun diganti dengan nama PLN Exploitasi XI sebagai kesatuan BPU - PLN Jawa Barat, di luar DKI Jaya dan Tangerang.

Tahun 1972, pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 1972 tentang Perusahaan Umum Listrik Negara, yang menyebutkan bahwa status PLN menjadi Perusahaan Umum Listrik Negara. Kemudian mengacu pada peraturan Menteri PUTL nomor 013/PRT/1957 tanggal 8 September 1957 tentang Organisasi dan tata Kerja Perusahaan Umum Listrik Negara, maka PLN mengadakan reorganisasi menyangkut nama, tugas dan wilayah kerja daerah.

Berdasarkan pengumuman PLN Exploitasi XI nomor 05/DIII/Sek/1975

tanggal 14 Juli 1975, PLN Exploitasi XI diubah namanya menjadi Perusahaan Listrik Negara Distribusi Jawa Barat.

Dengan adanya peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 23 tahun 1994 tanggal 16 Juni 1994 maka bentuk Perusahaan Umum Listrik Negara Distribusi Jawa Barat diubah lagi menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dengan sebutan PT PLN (persero) Distribusi Jawa Barat sejak tanggal 30 Juli 1994, sesuai akta pendirian. Selanjutnya sesuai keputusan Direksi PT PLN (Persero) nomor 28.K/010/DIR/2001 tanggal 20 Februari 2001, PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat diubah menjadi PT PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat.

Kemudian, melalui Surat Keputusan PT. PLN (Persero) Nomor : 120.K/010/DIR/2002 tanggal 27 Agustus 2002, PT PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat berubah menjadi **PT. PLN (Persero) DISTRIBUSI JAWA BARAT DAN BANTEN** hingga saat ini.

2.2 Tempat dan Kedudukan Perusahaan

2.2.1 Tempat

PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten Ujung Berung yang bertempat di Jl. Raya Ujung Berung No. 65 Bandung.

2.2.2 Kedudukan Perusahaan

PT. PLN (Persero) yang berada di Jl Raya Ujung Berung itu merupakan cabang/ rayon di wilayah Ujung Berung sebagai UPJ (Unit Pelayanan Jaringan) bekerja melayani pelanggan dalam pemasangan instalasi listrik baru dan Pembayaran Rekening Listrik dan lain-lain.

2.3 Bentuk dan Badan Hukum Perusahaan

2.3.1 Bentuk

PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten sebagai Perusahaan BUMN yang merupakan instansi pemerintah yang ditetapkan sebagai Perusahaan Perseorangan hingga saat ini.

2.3.1 Badan Hukum Perusahaan

Dasar hukum dan pedoman yang digunakan dalam menyusun perubahan ini adalah :

1. PP No. 23 Th. 1994
2. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi N0. 03P K /02/M PE /1987
3. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No. P. 40/M PE/1990
4. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No. 02 P/451/M PE/1991
5. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No.1134.K/43/MPE/1992
6. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 561 K/02/M PE/1987
7. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 1706 K/02M PE/1992
8. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 1261 K/02/M PE/1992
9. Keputusan Menteri Keuangan No. 53/ KMK. 016/1995
10. Anggaran Dasar PT. PLN (Persero)
11. Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No. 001 K/030.Dir/1994
12. keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 28.K/010/DIR/2001
13. Keputusan PT. PLN (Persero) No. 120.K/010/DIR/2002

2.4 Bidang Pekerjaan Perusahaan

PT. PLN (Persero) Unit Ujung Berung sebagai Unit Pelayanan Jaringan (UPJ) untuk pembayaran rekening Listrik, pemasangan baru listrik dan lain-lain. Untuk melayani masyarakat atau pelanggan khususnya yang berada di wilayah Ujung Berung.

2.5 Visi dan Misi

Visi adalah Diakui sebagai Perusahaan Kelas Dunia yang bertumbuh-kembang Unggul dan Terpercaya dengan bertumpu pada Potensi insani.

Misi adalah sebagai berikut:

- Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan pemegang saham.
- Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
- Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi.
- Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.

Moto PT. PLN (Persero) : Listrik untuk kehidupan yang lebih baik

Penerapan Nilai-Nilai:

1. Saling percaya
2. Integritas
3. Peduli
4. Pembelajar

2.6 Bidang Pekerjaan Devisi/ departemen Perusahaan

Bidang pekerjaan PT. PLN (Persero) adalah Untuk melayani kepada masyarakat. PT. PLN (Persero) merupakan instansi pemerintah yang ditetapakan sebagai perusahaan perseoraandan dengan adanya keputusan Menteri menjadi departemen Pertambangan dan Energi hingga saat ini. Bahwa status PLN menjadi Perusahaan Umum Listrik negara pada tanggal 30 juli 1994 sesuai dengan akte pendirian.

2.7 Struktur Organisasi Perusahaan

Pada umumnya setiap perusahaan mempunyai struktur organisasi karena struktur organisasi tersebut mempunyai tujuan yang menciptakan kerja sama antara bawahan dan atasan sehingga tercipta suatu lingkungan kerja yang dinamis, harmonis, yang saling berkaitan didalam dan sekitar tempat kerja.

Bagian dari struktur organisasi PT. PLN (Persero) adalah sebagai berikut :

1. MANAJER AREA
   a. Kinerja Utama

      Rasio operasi, Susut, Piutang, Kepuasan pelanggan dan Citra perusahaan, disamping kinerja unit lainnya.

   b. Uraian Fungsi Utama

      - Mensinergikan seluruh unit garis depan dan seluruh fungsi di APJ dalam mengoptimalkan sumber daya dan kemitraan untuk memaksimalkan Kinerja Unit dan Citra Perusahaan berdasarkan hukum dan ketentuan yang berlaku, termasuk surat kuasa dan

kebijakan General Manager, termasuk pengembangan system informasi terintegrasi dan "oneline" dan pengembangan garis depan baru.

- Menjalin komunikasi dan hubungan kerja internal dan eksternal yang efektif dan mengembangkan dan memberdayakan seluruh potensi SDM untuk meningkatkan Budaya Perusahaan, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi/ audit internal.

2. AHLI

a. Membuat rekomendasi solusi masalah dan konsep realistis untuk memaksimalkan kinerja APJ.

b. Melaksanakan kegiatan tertentu, bekerjasama dengan unit garis depan atua fungsi terkait .

c. Bertanggung jawab kepada manager

3. ASISTEN MANAJER NIAGA

Memfasilitasi unit garis depan dalam memaksimalkan kinerja melalui sistem informas, Administrasi Niaga, Sistem Pelayanan dan Sistem Pemasaran.Bekerja sama dengan Asisten Manager Perencanaan & Distribusi, Asisten SDM dan Keuangan, Ahli, fungsi terkait dan Unit Garis depan untuk memaksimalkan Kinerja APJ dan distribusi Jawa Barat dan banten, khususnya penekenan susut dan tunggakan. Mengkoordinasikan fungsi-fungsi Supervisor, Ahli, Juru Utama dan Jurudilingkungan Bagian Niaga & bertanggung jawab kepada manager APJ.

4. ASISTEN MANAGER PRENCANAAN DAN DISTRIBUSI

Mengelola fungsi perencanaan terpadu dan fungsi pengelolaan sistem distribusi, bekerja sama dengan ahli dan fungsi terkait di APJ, untuk memfasilitasi unit garis depan dalam memaksimalkan kinerjanya.

a. Fungsi Perenacanaan

1. Merencanakan pengembangan jaringan distribusi 1 tahun kedepan.
2. Memantau realisais pelaksanaan investasi dan pemeliharaan di APJ.
3. Dalm melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan bidang perencanaan distribusi.

b. Fungsi Distribusi

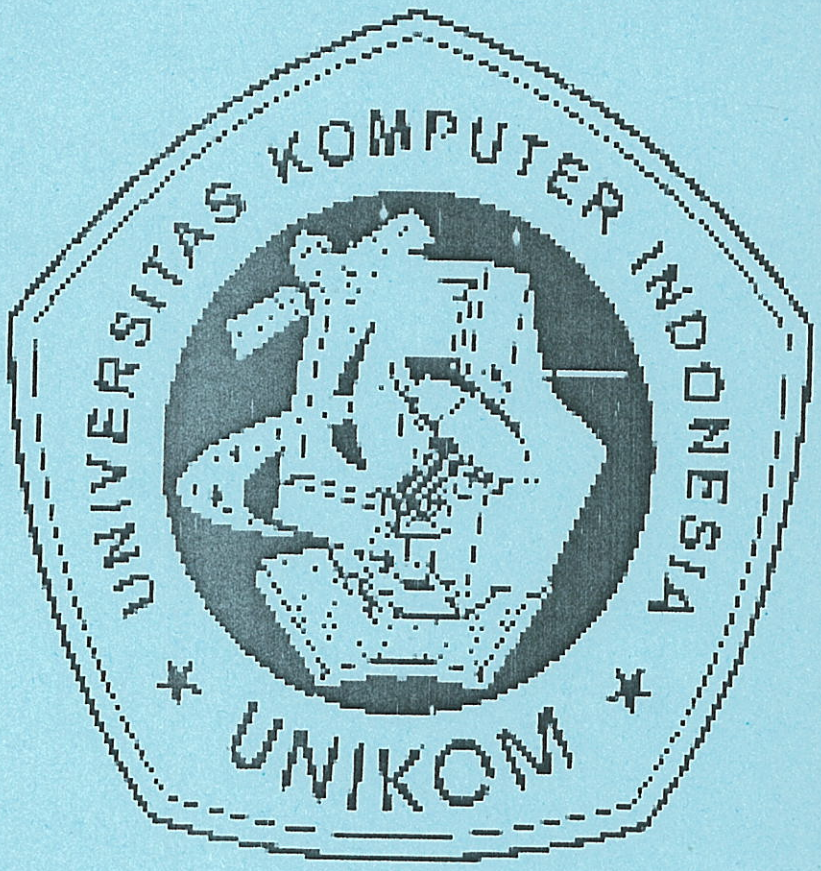
1. Mecnittor dan merekap data jaringan TM/ TR eksisting dan merekap data UPJ TM/ TR.
2. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan pelayanan gangguan TM/ TR disemua UPJ.
3. Mengawasi langsung SOP jaringan system untuk kunjungan VVIP/ VIP.
4. Melaksanakan pemasangan, pengoperasian, pemeliharaan dan pengendalian system Automatic System Reading.
5. Dalam melaksanakan tugas berkomunikasi dengan Bidang Distribusi.

5. ASISTEN MANAGER SDM DAN KEUANGAN

Fungsi utama Asisten Manager SDM dan Keuangan adalah :

- Mengelola fungsi keuangan, fungsi SDM dan Organisasi, fungsi administrasi, hukum dan komunikasi, untuk memfasilitasi unit garis depan dalam memaksimalkan kinerjanya.

- Mengkoordinasikan penyediaan likuiditas opeasional Unit Garis Depan, rekonsiliasi penerimaan pembayaran rekening listrik direkening bank PLN, pengembangan "autodebet", program kehumasan, pengembangan sarana. Bersama Asisten Manager Niaga, Asisten Manager Perencanaan & Distribusi dan Unit garis Depan yang bersangkutan.


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM